

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita penduduk di suatu negara dalam jangka panjang. Proses pembangunan ekonomi tidak serta merta hanya berfokus pada peningkatan pendapatan namun juga harus disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dengan adanya peningkatan pendapatan dan perbaikan sistem kelembagaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang merata dapat mengurangi masalah-masalah ekonomi, seperti: kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan di suatu daerah (Arsyad, 2010:11).

Todaro dan Smith (2003) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu: (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustance*); (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia; dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Selain itu, keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya kesenjangan ekonomi yang terjadi antara daerah. Suatu perekonomian mengalami pertumbuhan apabila kegiatan ekonomi daerah yang dicapai mengalami peningkatan dibandingkan dengan ekonomi daerah tahun

sebelumnya. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari pembangunan ekonomi yang dilakukan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang hakikatnya menekankan untuk membangun manusia. Salah satu bentuk dari pembangunan ekonomi daerah adalah adanya hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola setiap sumberdaya yang ada. Selain itu, pembangunan ekonomi daerah dapat membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Adanya pola hubungan tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010: 374).

Lebih lanjut Kuncoro (2012:185) mengidentifikasi masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada potensi daerah yang bersangkutan (*endogenous development*). Potensi daerah tersebut diketahui dengan menggunakan potensi SDM, kelembagan, dan sumberdaya fisik secara lokal/daerah. Apabila masalah tersebut tidak segera diatasi maka akan mengganggu proses pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi yang berjalan lambat dapat membuat suatu daerah tidak akan cepat berkembang sehingga akan berpengaruh pada pemerataan pembangunan antar daerah.

Pemerintah pusat dalam proses memajukan pembangunan daerah membentuk kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang

seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola potensi-potensi yang terdapat pada daerah tersebut. Dalam otonomi daerah ada dua kondisi yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, yaitu: (1) tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya; (2) kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda, misalkan: beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya sedangkan daerah lain mengalami penurunan pada sektor yang sama (Kuncuro, 2004).

Salah satu indikator keberhasilan perekonomian suatu daerah dapat dilihat pada laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah diperoleh dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Suatu daerah yang meningkatkan nilai PDRB dari tahun ke tahun dapat dikatakan bahwa daerah tersebut diharapkan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang positif (Lihat Tabel 1.1).

**Tabel 1.1. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2014 (%)**

<b>Tahun</b>	<b>Kabupaten Wonogiri</b>	<b>Rata-rata Kecamatan</b>
2010	3,14	2,93
2011	4,72	4,47
2012	6,12	5,68
2013	4,34	4,43
2014	5,39	5,01

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri (2010-2014)

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri cenderung berfluktuasi selama tahun 2010-2014. Pertumbuhan dari tahun 2010 sampai 2012 cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,12 %. Pada tahun 2013 turun menjadi 4,34% dan kembali naik sebesar 5,39 % pada tahun 2014. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten wonogiri lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di seluruh kecamatan.

Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan di Kabupaten Wonogiri dapat dianalisis tentang ketimpangan pendapatan dan sektor basis ekonominya. Ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah atau wilayah akan menimbulkan permasalahan di daerah tersebut. Ketimpangan yang tinggi akan berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi daerah. Sehingga ketimpangan yang terjadi harus diatasi agar tidak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, usaha untuk menciptakan pemerataan dan mengurangi ketimpangan pendapatan sangatlah tidak mudah, terutama yang disebabkan oleh *trade off*

antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003:240).

**Tabel 1.2. PDRB ADHK menurut Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2014 (juta rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Kabupaten Wonogiri</b>	<b>Rata-rata Kecamatan</b>
2010	2.992.794,29	415.212,47
2011	2.992.794,29	429.065,18
2012	3.325.850,97	440.942,43
2013	3.470.048,41	456.512,50
2014	3.657.111,80	469.510,04

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri (2010-2014)

Dalam Tabel 1.2 menunjukkan bahwa rata-rata PDRB kecamatan di Kabupaten Wonogiri mempunyai perbedaan yang cukup besar dibandingkan PDRB Kabupaten Wonogiri. PDRB Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan tiap tahun, begitu pula yang terjadi di tiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut merupakan indikator adanya ketidakmerataan sehingga akan menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Wonogiri.

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah serius yang terjadi di setiap daerah. Masalah ketimpangan tersebut harus segera diatasi agar tidak semakin membesar. Berbagai upaya dalam mengatasi masalah ketimpangan pendapatan salah satunya dapat dilakukan dengan cara menganalisis adanya sektor-sektor basis di daerah tersebut. Adanya sektor basis yang memiliki keunggulan kompetitif maupun komparatif dapat dikembangkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi. Kemampuan daerah dalam menganalisis sektor basis sangat penting karena kontribusi

sektor basis terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah sangat besar.

Beberapa rujukan studi empiris tentang ketimpangan ekonomi antar daerah, dapat dilihat pada Mahardiki dan Priyo (2013) dan Kuncoro (2013). Ditambah dengan artikel-artikel jurnal yang menggunakan pendekatan IW, ET, dan SLQ-DLQ (baik artikel nasional maupun asing).

Berdasarkan dari latar belakang dan rujukan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis seberapa besar ketimpangan pendapatan dan sektor basis antar kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Untuk itu judul penelitian ini adalah **Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Identifikasi Sektor Basis Antar Kecamatan Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2014**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas serta penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis ketimpangan pendapatan dan sektor basis dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2014 ?
2. Sektor apa saja yang menjadi sektor basis dan non basis tiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2014 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi antar Kecamatan di Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2014.
2. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis tiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2014.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi berkaitan dengan ekonomi daerah terutama mengenai ketimpangan pendapatan dan untuk mengetahui potensi sektor basis yang terdapat di Kabupaten Wonogiri.
2. Bagi Instansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dan dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan serta pengembangan potensi sektor unggulan di wilayah Kabupaten Wonogiri.
3. Bagi kalangan akademisi dan pihak lain, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta dapat dijadikan acuan atau sumber referensi bagi peneliti lain di bidang pembangunan ekonomi daerah dengan ruang lingkup dan kajian yang berbeda.